

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada manusia yang terlahir dalam keadaan literat, maka dari itu membaca buku menjadi sarana untuk mewujudkan manusia yang literat. Buku memegang peranan penting sebagai jantung bagi dunia pendidikan dan literasi. Tidak heran apabila kalimat “buku adalah jendela dunia dan kunci untuk membukanya adalah dengan cara membaca” yang sudah ditanamkan secara turun-temurun masih tetap relevan hingga saat ini.¹ Mochtar Lubis memberikan sambutannya dalam buku berjudul “Buku dalam Indonesia Baru” 2000 dengan menyatakan, “*buku merupakan senjata yang kukuh dan berdaya hebat untuk melakukan serangan maupun pertahanan terhadap perubahan sosial, termasuk perubahan dalam nilai-nilai manusia dan kemasyarakatan.*”²

Kualitas suatu bangsa dapat ditakar berdasarkan tingkat literasi masyarakat negara tersebut. Semakin tinggi kualitas literasi suatu masyarakat mengindikasikan bahwa negara tersebut semakin berkualitas dan maju.³ Literasi juga berkaitan dengan kesenjangan ekonomi suatu negara. Semakin lebar jurang kesenjangan kualitas literasi antara masyarakat ekonomi atas dengan ekonomi bawah berkelindan dengan rasio pendapatan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa suatu negara yang bercita-cita ingin mempersempit jurang kesenjangan ekonomi hendaknya memberlakukan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas literasi sebab literasi diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan.⁴

¹ Dian Aswita et al., *Pendidikan Literasi: Memenuhi Kecakapan Abad 21*, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit K-MEDIA, 2022).

² Arselan Harahap et al., *Buku Dalam Indonesia Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).

³ Ane Permatasari, “Membangun Kualitas Bangsa Dengan Budaya Literasi,” *Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB 2015*, 2015, <https://core.ac.uk/download/pdf/35343297.pdf>.

⁴ Adin Bondar, “Analisis Pembangunan Bidang Perpustakaan Terhadap Peningkatan Kualitas Manusia Dan Penurunan Kemiskinan,” *Perpustakaan Nasional* 26, no. 2 (2019).

Meskipun budaya literasi berperan sangat penting, data yang dirilis oleh Institut Statistik UNESCO 2021, dari 208 negara yang ada Indonesia berada pada peringkat 100 dengan tingkat literasi 95,44%. Cukup jauh apabila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara seperti Filipina dengan tingkat literasi 96.62%, Brunei dengan tingkat literasi 96.66%, dan Singapura dengan tingkat literasi 96.67.⁵ Riset UNESCO lainnya yang masih terkait literasi dunia, secara mengejutkan menyatakan bahwa ketertarikan orang Indonesia untuk membaca hanya 1:1.000 atau dalam kata lain hanya ada 1 dari 1.000 orang yang senang membaca.⁶

Tingkat literasi Indonesia yang mencapai 95,5% tersebut patut dianggap sebatas pada *literacy* sebagai melek huruf yang merupakan antonim dari *illiteracy* atau buta huruf alih-alih *literacy* sebagai kebiasaan membaca sebagai antonim dari *aliteracy* atau melek huruf tapi tidak membaca.⁷ Hasil PISA tahun 2022 menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang dicapai siswa cukup jauh di bawah rata-rata OECD. Adapun Indonesia mendapat skor 366 untuk matematika, 383 untuk sains, serta 359 untuk literasi. Berdasarkan skor yang didapat, Indonesia berada pada ranking 69 dari 80 negara yang berpartisipasi. Rendahnya skor yang didapat menunjukkan bahwa kebanyakan siswa Indonesia dengan usia di atas 15 tahun masih kesulitan untuk memahami teks dan berpikir kritis.⁸

Beberapa penelitian menunjukkan pola konsisten yang menjadi akar dari rendahnya kualitas literasi Indonesia. Tiga penyebab utama dari rendahnya tingkat literasi yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah, rendahnya jenjang pendidikan masyarakat serta kurangnya akses terhadap

⁵ Septian Nur Ika Trisnawati, Uswatun Khasanah, and Naomi Fahma, "Tingkatkan Keterampilan Menulis Kritis: Perkuat Literasi Pendidikan Masa Depan," *AMONG: Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2024.

⁶ Hanna Meinita, "Kepala Perpustakaan: Kondisi Literasi Harus Dipahami Dari Hulu Hingga Hilir," *Perpustakaan Nasional*, 2021.

⁷ Arys Hilman Nugraha, "Paradoks Buku Indonesia: Tanggapan Untuk Willy Aditya," *Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)*, Agustus 2025, <https://www.ikapi.org/2025/08/28/paradoks-buku-indonesia-tanggapan-untuk-willy-aditya/>.

⁸ Achmad Zukhruf Alfaruqi and Nurwahidah Nurwahidah, "Reflection on Indonesia's PISA Scores and the 2024 Madrasah Teacher Competency Assessment Results: Challenges in Enhancing Teacher Competence," *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 15, no. 1 (February 2025): 11–19, <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i1.2559>.

buku yang berkualitas.⁹ Ketiga faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain dengan pemerintah sebagai poros utamanya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki tanggungjawab untuk memastikan agar pendidikan yang bermutu dapat dijangkau semua masyarakat serta aksesibilitas buku yang berkualitas dan murah.¹⁰

Banyak literatur yang pada temuannya menyatakan bahwa kemampuan seseorang dalam ranah literasi sangat erat kaitannya dengan pendidikan yang didapatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kemungkinan baginya untuk memiliki kemampuan literasi berkualitas juga meningkat.¹¹ Di lain sisi, kualitas pendidikan yang diterima individu ternyata juga memberi pengaruh kepada kualitas literasi masyarakat. Ironinya, ketimpangan kualitas pendidikan masih menjadi problematika yang memerlukan pembenahan serius di tanah air.¹² Kualitas pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terpencil) nyatanya masih jauh tertinggal dari daerah lain khususnya di puau Jawa dimana hal tersebut terjadi akibat kurangnya keperluan yang seharusnya menjamin terselenggaranya pendidikan dengan baik seperti sumber daya manusia dan infrastruktur.¹³

Minimnya akses terhadap buku yang berkualitas seringkali terjadi akibat sedikitnya perpustakaan yang tersedia, ketersediaan toko buku, hingga harga buku yang sulit dijangkau oleh keuangan semua kalangan.¹⁴ Perpustakaan berfungsi sebagai alat yang ampuh guna memastikan

⁹ Zahra Putri Alhaqni, "Aksi Nyata Membangun Bangsa, Siap Sukseskan Negara Dengan Literasi," *ADALAH* 4, no. 4 (July 2020), <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i4.16724>.

¹⁰ Neneng Yani Yuningsih, Salsabila Salsabila, and Susi Yuliant, "Pendekatan Kelembagaan: Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Literasi," *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 13, no. 1 (May 2025): 19–38, <https://doi.org/10.34010/q6s43p88>, hlm. 28.

¹¹ Ramadhani Kurniawan and Afi Parnawi, "Manfaat Literasi Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 2, no. 1 (February 2023): 184–95, <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i1.1148>.

¹² Riki Nasrullah and Puteri Asmarini, *Risalah Kebijakan: Meningkatkan Literasi Indonesia Melalui Optimalisasi Peran Buku* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024).

¹³ Tanti Nurmala Sari and Jasiah Jasiah, "Membangun Pendidikan Berkeadilan: Mengatasi Masalah Pemerataan Pendidikan Antara Daerah Dan Perkotaan," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 4 (April 2025): 1723–31, <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7661>.

¹⁴ Jalaludin Jalaludin, "Upaya Menumbuhkan Budaya Literasi di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Literasiologi* 7, no. 1 (October 2021), <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v7i1.272>.

terjangkaunya akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat dari berbagai kalangan sehingga dapat mengatasi hambatan finansial untuk membeli buku.¹⁵ Per bulan November 2025, tercatat jumlah perpustakaan sekolah di Indonesia sebanyak 219.419 unit. Namun, tidak semua perpustakaan tersebut dapat beroperasi dengan baik dan mampu menyediakan buku berkualitas. Belum optimalnya perpustakaan daerah acapkali terjadi karena pengaruh geografis yang menyebabkan wilayah sulit dijangkau, pegawai yang belum memadai, serta anggaran yang tidak seberapa.¹⁶ Dari jumlah tersebut hanya 6.73% (14.774) di antaranya yang terakreditasi Standar Nasional Perpustakaan.¹⁷

Kurangnya akses terhadap buku berkualitas juga disebabkan oleh harga buku yang sulit dijangkau keuangan masyarakat. Dalam banyak kasus, terdapat minat membaca yang baik namun biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli terlampau mahal.¹⁸ Adapun faktor yang menyebabkan mahalnya harga buku umum di Indonesia melibatkan banyak lapisan ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga struktur industri perbukuan. Utamanya disebabkan oleh tingginya biaya produksi yang meliputi biaya impor kertas hingga pencetakan, biaya pemasaran, distribusi buku yang tidak efisien, rendahnya permintaan, serta pungutan pajak.¹⁹

Mahalnya harga buku di Indonesia tidak sebanding dengan besarnya pendapatan masyarakat. Upah rata-rata per jam di Indonesia kurang lebih berada pada nominal Rp19.343,00²⁰ atau sekitar Rp3.094.818,00 per bulan.

¹⁵ Adi Prasetyawan, Inawati Inawati, and Setiawan Setiawan, "Peran Pustakawan dalam Implementasi Layanan Berbasis Inklusi Sosial," *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi* 6, no. 2 (December 2022): 248, <https://doi.org/10.17977/um008v6i22022p248-258>.

¹⁶ M Muslim, E Edrial, and Muhammad Sahaluddin, "Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam Pembudayaan Literasi Masyarakat di Kabupaten Sumbawa," *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik* 3, no. 2 (January 2023): 166–75, <https://doi.org/10.58406/kapitaselekt.v3i2.1079>.

¹⁷ Dyah Sugiyanto, *5 Strategi Perpustakaan Untuk Percepatan Akreditasi Perpustakaan*, 2025, <https://www.perpusnas.go.id/berita/5-strategi-perpusnas-untuk-percepatan-akreditasi-perpustakaan>.

¹⁸ Harahap et al., *Buku Dalam Indonesia Baru...*, hlm. 14.

¹⁹ Ayodhya Agti Firdausa, "Penulis Dan Buku, Lebih Baik Dipajak Atau Dibajak?," *Direktorat Jenderal Pajak*, 2023, <https://pajak.go.id/en/node/100026>.

²⁰ Faisal Javier, "Perbandingan Harga Beras Di Indonesia Dengan Negara Lain," *TEMPO*, September 9, 2025, <https://www.tempo.co/data/data/perbandingan-harga-beras-di-indonesia-dengan-negara-lain-2068126> (diakses pada 27 September 2025, pukul 21.40 WIB).

Bahkan banyak masyarakat yang hanya mendapat upah di bawah Rp1.500.000,00 per bulan.²¹ Sementara, harga buku umum di Indonesia rata-rata dibanderol dengan harga di atas Rp80.000,00. Bahkan menurut Kalis Mardiasih selaku pemilik toko buku “Akademi Buku” rata-rata harga satu buku di tahun 2025 lebih dari Rp100.000,00. Yang artinya, pendapatan rata-rata Indonesia yang masih rendah membuat harga satu buku bisa mencapai 2-10% dari total upah dalam satu bulan.

Hasil analisis dari Perpustakaan Nasional tentang korelasi antara tingkat gemar membaca masyarakat dengan penghasilan rata-rata perbulan menunjukkan bahwa nilai kegemaran membaca cenderung mengalami peningkatan seiring dengan semakin tingginya pendapatan rata-rata perbulan.²²

Tabel 1.1 Nilai Tingkat Gemar Membaca menurut Rata-rata Penghasilan Keluarga perbulan

NO	RATA-RATA PENGHASILAN KELUARGA PERBULAN	NILAI TINGKAT GEMAR MEMBACA
1	Kurang dari atau sama dengan Rp1,5 juta	65,67
2	Rp1,5 juta s/d Rp5 juta	72,23
3	Rp5 juta s/d Rp10 juta	76,45
4	Rp10 juta s/d Rp15 juta	78,94
5	Lebih dari Rp15 juta	80,38

Sumber: Survei Perpustakaan Nasional 2024

Akibat dari mahalnya harga buku dan rendahnya pendapatan, konsumen seringkali baru bisa melakukan pembelian ketika terdapat potongan harga yang diberikan oleh toko buku. Hal tersebut menjadi peluang bagi toko buku atau penerbit besar seperti Gramedia, Mizan, Shira Media dan Pustaka Baru untuk menggelontorkan diskon besar-besaran baik melalui

²¹ Badan Pusat Statistik, *Rata-Rata Upah/Gaji (Rupiah)*, Mei 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUyMSMy/rata-rata-upah-gaji.html> (diakses pada 28 September 2025, pukul 11.44 WIB).

²² Aminudin Aziz et al., *Kajian Gemar Membaca Masyarakat Indonesia (TGM) Tahun 2024* (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2024).

penjualan daring maupun pada penjualan langsung.²³ Pemberian diskon menjadi strategi yang efektif bagi toko atau penerbit untuk menjangkau konsumen serta meningkatkan penjualan dan bertahan dalam persaingan industri buku yang sangat ketat.²⁴

Ironinya, banyak toko buku kecil dan penerbit independen yang terpaksa harus gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan penerbit atau toko buku besar yang sering melempar diskon besar. Selama lima tahun terakhir, banyak sekali toko buku baik skala kecil hingga skala besar yang berguguran, terutama yang berlokasi di luar Yogyakarta dan Jakarta atau dalam kata lain jauh dari pusat-pusat penerbitan. Bahkan salah satu toko buku terbesar dan legendaris di Indonesia yaitu Toko Buku Gunung Agung juga turut menutup gerainya. Gugurnya Toko Buku Gunung Agung menambah daftar panjang deretan toko buku besar yang tutup, sebelumnya Books & Beyond, Togamas, dan Kinokuniya lebih dahulu mengundurkan diri.²⁵

Kondisi yang terjadi pada ekosistem buku Indonesia cukup kontras apabila dibandingkan dengan Korea Selatan. Menurut hasil riset Institut Statistik UNESCO 2021, Korea Selatan menduduki peringkat 71 dari 208 negara. Tercatat bahwa Korea Selatan merupakan negara dengan kualitas literasi terbaik dengan persentase mencapai 98.80%. Cemerlangnya kualitas literasi Korea Selatan juga sesuai dengan laporan International Publishing Data 2023. Tercatat bahwa Korea Selatan menduduki peringkat nomor satu di dunia sebagai negara dengan jumlah perusahaan penerbit paling banyak. Setidaknya terdapat 75.424 penerbit yang aktif dalam memublikasikan buku.

²³ Yoga Religia et al., "Peran Promosi, Harga dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen Toko Buku Gunung Agung, Jakarta)," *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 12, no. 1 (April 2023): 52, <https://doi.org/10.36080/jem.v12i1.2231>, hlm. 60.

²⁴ Tanika Candida Karim and Senen, "Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Buku Pelajaran Sekolah Pada Toko Buku Bumimedia Di Depok," *Journal of Research and Publication Innovation* 2, no. 4 (n.d.): 2024, hlm. 32.

²⁵ Anggun Gunawan, "Closed Bookstores and the Future of Our Literacy," *Kompas*, 2023, <https://www.kompas.id/artikel/en-tutupnya-toko-buku-dan-masa-depan-literasi-kita> (diakses pada 26 September 2025, pukul 20.35 WIB).

Selain itu Korea Selatan juga berhasil menerbitkan 338.237 buku ber-ISBN (*International Standard Book Number*) pada tahun 2022.²⁶

Tingkat literasi Korea yang tinggi dimulai oleh fenomena “*education fever*” yang mulai terjadi pada awal abad ke-19. Fenomena tersebut digambarkan dengan mayoritas masyarakat Korea yang memiliki dorongan sangat kuat untuk mengenyam pendidikan. Orang tua dari berbagai tingkatan sosial ekonomi terlibat dalam persaingan ketat untuk mendapatkan pendidikan paling baik dan bergengsi bagi anak-anak mereka.²⁷ Hasil menakjubkan dituai lima dekade kemudian dimana Korea menjadi salah satu negara dengan tingkat literasi yang sangat baik. Masyarakat Korea Selatan tidak hanya memandang literasi sebagai sekadar kapabilitas untuk membaca namun juga sebagai pilar kemajuan peradaban.²⁸

Tingginya tingkat literasi di Korea Selatan tersebut sepadan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Selama bertahun-tahun Korea Selatan konsisten berada dalam jajaran negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Pelajar di Korea Selatan diberi kewajiban untuk belajar selama 16 jam sehari mencakup belajar di sekolah dan les setelahnya. Bahkan waktu yang dihabiskan pelajar korea untuk kegiatan akademik merupakan yang terpanjang di antara negara OECD lainnya. Pada 2022, Korea Selatan berada pada peringkat 7 dalam survei PISA dengan nilai 521 untuk sains, 528 untuk matematika, dan 503 untuk literasi. Tentu hal tersebut tercapai berkat dukungan pemerintah terhadap sumber daya manusia serta fasilitas penunjang pendidikan.²⁹

²⁶ Vikrant Mathur et al., *International Publishing Data 2023* (New Delhi: International Publishing Association, 2023), hlm. 9.

²⁷ Klaus Dittrich and Dolf-Alexander Neuhaus, “Korea’s ‘Education Fever’ from the Late Nineteenth to the Early Twenty-First Century,” *History of Education* 52, no. 4 (July 2023): 539–52, <https://doi.org/10.1080/0046760X.2022.2098391>.

²⁸ Sahrul Mauludi, “Budaya Literasi Di Korea Selatan: Antara Buku Dan Teknologi,” *Pondok Pesantren Daar El-Qolam* 2, September 30, 2024, <https://www.daarelqolam3.sch.id/budaya-literasi-di-korea-selatan-antara-buku-dan-teknologi/> (diakses pada 26 September 2025, pukul 21.54 WIB).

²⁹ Hindun Qurrotu Aini and Abdal Malik Fajar Alam, “Perbandingan Kebijakan Pendidikan Antara Negara Korea Selatan Dan Korea Utara,” *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, no. 1 (January 2024): 29–35, <https://doi.org/10.54259/diajar.v3i1.2202>.

Perpustakaan di Korea Selatan tersebar secara merata untuk memudahkan akses warga negara terhadap informasi. Terutama sejak masa industrialisasi dan pembangunan ekonomi pada 1980-an, pemerintah dapat mengatasi kesenjangan aksesibilitas yang antara daerah kota dan desa. Hal tersebut merupakan wujud dari komitmen pemerintah Korea Selatan yang menyatakan bahwa perpustakaan merupakan fasilitas penting yang dibutuhkan sebagai penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat.³⁰ Masyarakat Korea menganggap bahwa fungsi perpustakaan tidak hanya sebagai penyedia informasi dan penyebar pengetahuan namun juga sebagai ruang belajar sepanjang hayat, rumah ketiga, dan tempat rekreasi.³¹

Apabila dibandingkan dengan negara maju lainnya, harga buku di Korea Selatan cenderung lebih murah. salah dua faktor penyebabnya yaitu tidak diberlakukannya pajak kertas sebagai bahan baku buku dan pengecualian buku cetak dari PPN. Mutu buku di Korea Selatan lebih bagus dibandingkan buku terbitan China, namun harganya lebih murah dibandingkan terbitan Jepang maupun Amerika. Menurut Korean Publisher Association, rata-rata harga buku yang baru dirilis di Korea Selatan adalah 19.529KRW atau sekitar Rp231.050,00.³²

Adapun upah minimum per bulan di Korea Selatan pada tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Korea adalah 4,831 juta KRW atau kurang lebih setara dengan Rp57.156.237,00.³³ Sehingga dapat diasumsikan bahwa, orang Korea Selatan hanya memerlukan upah kurang lebih dua jam untuk membeli sebuah buku yang baru dirilis.

³⁰ Jiyoung Kim and Jiwon Lee, "An Analysis of Spatial Accessibility Changes According to the Attractiveness Index of Public Libraries Using Social Media Data," *Sustainability* 13, no. 16 (August 2021): 9087, <https://doi.org/10.3390/su13169087>.

³¹ Gidong Byun, Gyeongyeon Lee, and Mikyoung Ha, "How Public Libraries Reach out to Adolescents: A Study of Adolescents' Perceptions of Teen Spaces¹⁾ in Korean Public Libraries," *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, January 21, 2025, 1–14, <https://doi.org/10.1080/13467581.2025.2455025>.

³² Nam Kyung-Don, "Average Book Price Nears 20,000 Won," *The Korea Herald*, June 11, 2025.

³³ Noriana Puspitasari and Rio Sundari, "Analisis Program Gender Dan Ketenagakerjaan Oleh International Labour Organization (ILO) Dalam Pekerjaan Dan Upah Di Korea Selatan Tahun 2022-2024," *Jurnal Kajian Pemerintah: Jurnal Pemerintahan, Sosial Dan Politik* 11, no. 2 (Oktober 2025), [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).23766](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).23766), hlm. 292.

Atau dalam kata lain, harga satu buku baru di Korea Selatan hanya mencapai 0,51% dari upah minimum yang ditetapkan. Namun sama seperti Indonesia, banyak pekerjaan yang upahnya jauh di bawah upah minimum. Menurut data dari OECD, rata-rata gaji bulanan terendah di Korea Selatan yaitu 1,591 juta KRW atau setara dengan Rp18.047.202,00.

Bagi Indonesia, minimnya regulasi yang mengatur harga dan maksimal diskon yang diperbolehkan menjadi mimpi buruk bagi eksistensi penerbit dan toko buku independen atau skala kecil. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 dengan maksud untuk melindungi dan memberikan topangan bagi industri perbukuan di Indonesia, namun sangat disayangkan sebab dalam implementasinya hampir sama sekali tidak menyentuh pengaturan harga buku umum.³⁴ Sementara itu, pemerintah Korea Selatan mendukung persaingan usaha yang sehat pada industri perbukuan dengan menerapkan kebijakan *Fixed Book Price System (FBPS)* atau Sistem Harga Buku Tetap. Kebijakan tersebut menentukan bahwa harga buku ditentukan oleh penerbit dan penjualan ulang atas buku tersebut diperbolehkan untuk memberi diskon maksimal 15%

Sebelum Korea Selatan, banyak negara-negara Eropa yang sudah terlebih dahulu menerapkan Sistem Harga Buku Tetap. Sekitar dua pertiga negara di Eropa menerapkan kebijakan tersebut, bahkan ada yang sudah menerapkannya sejak tahun 1829. Hasil dari kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara yang menerapkan Sistem Harga Buku Tetap mengalami penjualan buku yang lebih tinggi tanpa membuat harganya melambung tinggi. Selain itu, Sistem Harga Buku Tetap juga terbukti dapat menjaga keberlangsungan toko buku kecil atau independen dan mendorong penerbitan buku yang lebih beragam.³⁵

³⁴ Elga Andina, "Paradoks Regulasi Buku: Evaluasi Pengaturan Buku Umum Di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 15, no. 2 (December 2024), <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v15i2.4628>.

³⁵ Rhys J. Williams, "Empirical Effects of Resale Price Maintenance: Evidence from Fixed Book Price Policies in Europe," *Journal of Competition Law & Economics* 20, nos. 1–2 (June 2024): 108–36, <https://doi.org/10.1093/joclec/nhae004>.

Adapun pemilihan negara Korea Selatan sebagai pembanding yaitu didasarkan pada laporan *International Publishing Association* tahun 2023. Laporan tersebut menunjukkan bahwa dari 23 negara yang berada di Region Asia, hanya terdapat empat negara yang memiliki regulasi yang mengatur harga buku umum. Empat negara tersebut adalah Jepang, China, Nepal, dan Korea Selatan. Akan tetapi, dari empat negara tersebut hanya regulasi milik Korea Selatan yang secara spesifik mengatur mengenai pembatasan diskon.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana perbedaan paradigma pemerintah dalam merumuskan regulasi dan bagaimana pengaturan atas harga buku umum yang diterapkan memberi dampak terhadap persaingan usaha pada ekosistem perbukuan. Adapun urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengungkap dinamika kebijakan pemerintah atas penetapan harga buku umum yang erat kaitannya dengan perlindungan industri buku dan persaingan pasar yang sehat. Untuk itu, penulis mengangkat judul “**Studi Komparasi Pengaturan Persaingan Usaha atas Harga Buku Umum di Indonesia dan Korea Selatan (Perspektif Filsafat Hukum dan *Maṣlahah Mursalah*)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan filsafat hukum yang melandasi perumusan regulasi atas harga buku umum di Indonesia dan Korea Selatan?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* atas pengaturan harga buku umum di Indonesia dan Korea Selatan?
3. Bagaimana akibat dari penerapan regulasi atas harga buku umum terhadap kondisi ekosistem buku umum di Indonesia dan Korea Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji perbandingan filsafat hukum yang melandasi perumusan regulasi atas harga buku umum di Indonesia dan Korea Selatan.
2. Untuk mengkaji tinjauan *maṣlahah mursalah* atas pengaturan harga buku umum di Indonesia dan Korea Selatan.
3. Untuk mengkaji akibat dari penerapan regulasi atas harga buku umum terhadap kondisi ekosistem buku umum di Indonesia dan Korea Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam lingkup disiplin ilmu hukum persaingan usaha dan industri perbukuan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan ataupun sumber rujukan.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi industri buku, dapat menjadi informasi bagi para penulis, penerbit, dan pemilik toko buku agar lebih memahami permasalahan apa yang terjadi dalam industri perbukuan sehingga mereka dapat mempertimbangkan langkah ke depan dalam mempertahankan industri buku.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam bentuk pemikiran atau ide terhadap hukum positif khususnya yang mengatur tentang sistem perbukuan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membentuk regulasi di masa depan sebagai bentuk kepedulian terhadap ekosistem buku umum dalam negeri khususnya penerbit dan toko buku independen.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi pemantik kesadaran masyarakat akan krusialnya peran mereka dalam menjaga eksistensi industri buku umum.

3. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang hendak menggunakan konsep atau dasar penelitian yang serupa yakni mengenai perbandingan penetapan harga buku umum di Indonesia dan Korea Selatan perspektif persaingan usaha.

E. Penegasan Istilah

1. Studi Komparasi

Studi komparasi merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menemukan persamaan dan perbedaan atas dua hal atau lebih yang diperbandingkan. Dalam ranah hukum, studi komparasi terbagi

menjadi tiga jenis, yaitu: 1) komparasi epistemologis, berupaya untuk menelaah permasalahan-permasalahan filsafat dari ilmu komparasi hukum, 2) komparasi metodologis, upaya untuk memahami komparasi dari unsur metodologi keilmuan hukumnya, dan 3) komparasi substantif, yang berusaha membandingkan substansi suatu hukum dengan hukum-hukum yang berlainan.

2. Hukum Persaingan Usaha

Frasa hukum persaingan usaha tersusun atas tiga kata, yaitu “hukum”, “persaingan”, dan “usaha”. Kata “persaingan” dapat diartikan sebagai sebuah kontestasi antara dua atau lebih individu dan/atau badan untuk memperebutkan objek yang sama.³⁶ Sementara definisi “usaha” yaitu segala sesuatu yang melibatkan satu atau lebih individu yang membutuhkan kontribusi waktu, atensi dan tenaga dengan maksud untuk mempertahankan hidup atau mencari laba.

Hukum persaingan usaha merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mencegah praktik monopoli serta perbuatan dan perjanjian yang dapat menyebabkan timbulnya persaingan tidak sehat dalam suatu ekosistem pasar.³⁷ Secara eksplisit hukum persaingan usaha mengacu kepada penekanan pada “persaingan” sehingga pelaku usaha jauh dari praktik-praktik yang berdampak pada tidak sehatnya persaingan pasar. Apabila mengacu pada bahasa Inggris, hukum persaingan usaha memiliki beberapa padanan lain selain *competition law*, yaitu *antimonopoly law* (hukum anti-monopoli) dan *antitrust law* (hukum antitrust).³⁸

3. Buku Umum

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Pasal 6 Ayat (1) buku umum adalah jenis buku di luar

³⁶ Rahmayani Rahmayani, Rezmia Febrina, and Yetti Yetti, “Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha,” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 4 (December 2023): 291–306, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.3356>, hlm. 295.

³⁷ Sisca Ferawati Burhanuddin, “Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Lingkungan Bisnis Perusahaan,” *Jurnal Mahalisan* 1, no. 1 (December 2024): 80–97, <https://doi.org/10.70837/qhmerm64>, hlm. 82.

³⁸ Mahlil Adriaman et al., *Hukum Persaingan Usaha* (Padang: CV Gita Lentera, 2024), hlm. 7.

pendidikan. Jenis buku yang termasuk ke dalam kategori buku umum meliputi fiksi, sastra, roman, misteri, biografi, humor dan sebagainya.³⁹ Sementara di Korea Selatan, frasa buku umum juga mengacu kepada literatur-literatur di luar buku edukasi seperti puisi, buku non-fiksi tentang topik sejarah, sains, kesehatan, serta buku fiksi penenang (*K-Healer*).⁴⁰

4. Filsafat hukum

Filsafat hukum merupakan salah satu cabang anak dari filsafat yang secara filosofis berupaya mendalami esensi atau intisari dari hukum.⁴¹ Adapun hukum yang menjadi objek kajian di sini tidak terbatas pada hukum positif atau undang-undang saja, namun semua bentuk aturan mengenai tingkah laku atau etika.⁴²

5. *Maṣlahah mursalah*

Abu Zahrah mengartikan *maṣlahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat, namun tidak memiliki redaksi nash yang melegitimasinya. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa ketika hal demikian terjadi, maka sah untuk dijadikan sebagai dasar hukum dan dirujuk sepanjang sesuai dengan syariat.⁴³

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I akan menguraikan latar belakang masalah penelitian mengenai fenomena pemberian diskon pada buku umum di Indonesia dan Korea Selatan sekaligus memaparkan mengenai alasan mengapa penelitian ini perlu

³⁹ Perpustakaan Kota Tangerang, *Koleksi Buku Umum*, Mei 2025, <https://perpustakaankotatangerang.org/2025/05/koleksi-buku-umum/> (diakses pada 28 September 2025, pukul 15.08 WIB).

⁴⁰ Lydia Venn, "Best Korean Books: 12 Novels That Will Get You Seriously Invested in Korean Literature," *COSMOPOLITAN*, Agustus 2024, <https://www.cosmopolitan.com/uk/entertainment/g61912074/best-korean-books/> (diakses pada 28 September 2025, pukul 15.18 WIB).

⁴¹ Ervina Dwi Indriati and Hudi Karno Sabowo, *Filsafat Hukum* (Semarang: Badan Penerbit STIEPARI Press, n.d.), hlm. 1.

⁴² Fatkhul Muin and Agus Prihartono, *Buku Ajar Filsafat Hukum: Suatu Pengantar* (Bojonegoro: Madza Media, 2022), hlm. 19.

⁴³ Prahasti Suyaman, "Maṣlahah mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath," *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024): 417–29, <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>.

dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab II membahas mengenai kajian pustaka yang terdiri atas landasan teori yang sesuai dengan permasalahan yang hendak dikaji yaitu mengenai hukum persaingan usaha, filsafat hukum, dan konsep *maṣlahah mursalah*. Selain itu bab ini juga memaparkan penelitian terdahulu yang memiliki bidang kajian serupa dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan. Bab ini tersusun atas sub-bab jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang meliputi sumber data primer, sekunder serta tersier, teknik pengumpulan data, cek keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV menjabarkan hasil penelitian berupa paparan data dan temuan penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjabarkan mengenai pengaturan harga buku umum yang diterapkan di Indonesia dan Korea Selatan.

BAB V PEMBAHASAN

Bab V memaparkan hasil analisis terkait perbandingan filsafat hukum yang menjadi landasan dalam merumuskan regulasi, tinjauan *maṣlahah mursalah* atas pengaturan harga buku umum di Indonesia dan Korea Selatan, dan dampak dari pengaturan tersebut terhadap kondisi ekosistem buku umum.

BAB VI PENUTUP

Bab VI berisi kesimpulan atas pemaparan dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan, juga terdapat saran yang berfungsi sebagai anjuran atau rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan misalnya pemangku kebijakan atau peneliti yang selanjutnya.